

# **Pelatihan Penggunaan Aplikasi Penentuan Prioritas Rencana Kerja Pemerintahan Desa**

**Gustin Setyaningsih<sup>1</sup>, Muhamad Awiet Wiedanto Prasetyo<sup>2</sup>, Galih Firmansyah<sup>3</sup>,  
Sabrina Uhti Kusreynada<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Sistem Informasi

<sup>4</sup> Program Studi Teknologi Informasi

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Amikom Purwokerto

Email : Gustin@amikompurwokerto.ac.id<sup>1</sup>, mawp@amikompurwokerto.ac.id<sup>2</sup>,  
Galihjarviz078@gmail.com<sup>3</sup>, uhti1811@gmail.com<sup>4</sup>

## **ABSTRAK**

Berdasarkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pemerintah desa perlu melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). RPJMDes dan RKPDDes merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Ada beberapa masalah dalam penentuan rencana kerja pembangunan suatu desa, yaitu tidak adanya hal yang menjadi prioritas dalam penentuan pembangunan. Dalam perencanaan kerja pembangunan desa, pemerintah desa akan melakukan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Mekanisme dalam menentukan program kerja dan menyusun anggaran desa yaitu menerima masukan masyarakat yang selanjutnya akan dilakukan musyawarah melalui rapat RW dan Musyawarah Desa. Permasalahan yang sering terjadi yaitu dalam melakukan rencana kerja harus mempertimbangkan skala prioritas, belum ada sistem pendukung keputusan untuk penentuan prioritas rencana kerja dan sistem saat ini belum terkomputerisasi secara maksimal dalam penggunaannya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kami memberikan solusi berupa pengimplementasian sistem yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan mitra. Pelatihan sudah terlaksana dengan baik dan lancar sesuai rencana. Kesimpulannya adalah aplikasi yang telah dibuat dan pelatihan yang diselenggarakan dapat memberikan kemudahan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa Kedunggede dalam melakukan Penentuan Prioritas Rencana Kerja Pemerintahan Desa.

*Kata Kunci: Rencana Kerja Desa, Aplikasi Website, Pemerintahan Desa*

## **ABSTRACT**

*Based on Permendagri Number 66 of 2007 concerning Village Development Planning, village governments need to prepare Village Medium-Term Development Plans*

*(RPJMDes) and Annual Development Plans or Village Government Work Plans (RKPDes). RPJMDes and RKPDes are the basis for village development with the aim of improving the quality of life and welfare of village communities. There are several problems in determining the development work plan of a village, namely the absence of things that are priorities in determining development. In planning village development work, the village government will hold Village Development Planning meetings (Musrenbangdes). The mechanism for determining work programs and compiling the village budget is to receive community input which will then be deliberated through RW meetings and Village Consultations. The problem that often occurs is that in carrying out work plans one must consider priority scales, there is no decision support system for prioritizing work plans and the current system has not been fully computerized in its use. To solve this problem, we provide a solution in the form of implementing a system that has been adapted to partner needs. The training was carried out well and smoothly according to plan. The conclusion is that the application we have made and this training we created can help the village government and the people of Kedunggede Village in prioritizing the Village Government Work Plan.*

*Keywords: Village Work Plan, Website Application, Village Government*

## **PENDAHULUAN**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Hariguna, 2018). Pada pasal 23 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa bahwa Pemerintah Desa diselenggarakan oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa (Aprianto, 2018). Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) perlu dilakukan untuk menuju ke arah pencapaian visi, misi dan pembangunan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 66 Tahun 2007 kepada pemerintah desa untuk disusun setiap tahun. RKPDes adalah rencana tahunan yang perinci dan operasional yang disusun sebagai jabaran dari RPJMDes (Tiza, 2019). Jika RKPDes disusun, maka akan tersusun pula perencanaan tahunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa secara maksimal dalam pemanfaatan potensi desa. Pembangunan desa menuju desa yang sejahtera dan maju mandiri akan lebih efektif dan efisien.

Dokumen RKPDes adalah dokumen milik masyarakat dan pemerintah desa yang wajib memberikan informasi, bertanggung jawab dan bersifat transparan

terhadap masyarakat. Penyusunan dokumen RKPDes dilakukan melalui musyawarah mufakat. Beberapa tokoh yang terlibat dalam penyusunan RKPDes yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan, kepala dusun, anggota LPMD, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bidan desa, kader posyandu, kepala sekolah dan guru PAUD dan SD, tokoh adat dan masyarakat, masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan lain-lain. Dalam menyusun dokumen RKPDes terdapat tiga proses yaitu persiapan musrenbang desa, pelaksanaan musrenbang desa, dan sosialisasi (Purbasari, 2018). Penyusunan RKPDes diawali dengan musyawarah desa. Musyawarah ini membahas tentang perencanaan pembangunan tahunan dengan agenda laporan realisasi RKPDes tahun berjalan oleh kepala desa, pokok-pokok pikiran BPD, aspirasi dan prakarsa masyarakat. Tim penyusun RKPDes akan dibentuk oleh kepala desa. Tim penyusun RKPDes akan melakukan pencermatan pagu indikatif desa dan rencana program yang akan masuk ke desa melalui konsultasi langsung dengan pemerintah kabupaten/kota atau informasi lainnya, melaksanakan pencermatan ulang RPJM Desa, melampirkan desain, RAB kegiatan dan DU RKP untuk diserahkan kepada kepala desa.

Musrenbang desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Tim penyusun RKPDes melaporkan hasil kerjanya berupa hasil pencermatan pagu indikatif, program yang akan masuk ke desa, hasil pencermatan RPJM Desa, rancangan RKPDes melalui pembahasan bidang dan prioritas bidang yang dituangkan dalam matrik Rancangan RKPDes. Kemudian, musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD untuk melaporkan hasil rancangan RKPDes. Pembahasan dan penetapan RKPDes dalam bentuk matrik rencana Program dan Kegiatan tahunan. Terakhir, Musyawarah BPD diselenggarakan oleh BPD untuk menetapkan peraturan desa mengenai RKPDes.

Terdapat beberapa masalah dalam menentukan rencana kerja pembangunan suatu desa yaitu tidak adanya hal yang menjadi prioritas dalam hal penentuan pembangunan. Musyawarah dengan masyarakat desa dilakukan oleh pemerintah Desa untuk membuat keputusan namun untuk bahan pertimbangan tidak ada aspek yang pasti dilakukan.

Tahap pembangunan desa harus mempertimbangkan unsur keadilan, skala prioritas, dan sistem pendukung keputusan untuk menentukan prioritas RKPDes. Namun, unsur tersebut belum ada dan sistem yang digunakan belum terkomputerisasi secara maksimal (Setyaningsih, 2019). Selain itu, dalam masa pandemi Covid-19, masyarakat dihimbau oleh pemerintah untuk tidak berkerumun di suatu tempat. Oleh karena itu, proses musyawarah harus dilakukan dengan pembatasan jumlah masyarakat yang hadir.

Penguasaan ilmu bidang IT adalah sebuah kebutuhan dalam menghadapi era globalisasi. Menurut Purwanto (2017), kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini karena kemajuan teknologi akan berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi informasi berbasis komputer mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja. Secara praktis, hal tersebut akan terjadi apabila sistem dirancang dengan sempurna bagi semua pengguna yang memiliki pemahaman dan pengertian mengenai manajerial dan organisasi. Ilmu informasi teknologi dan komputer adalah ilmu yang banyak digunakan di berbagai bidang kehidupan untuk mempermudah pekerjaan perangkat desa dalam melakukan penentuan rencana kerja dalam suatu desa (Septima, 2020). *E-government* merupakan contoh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintahan dengan cara yang lebih efisien, penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah, memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Pada tahun 2020, di Pemerintahan Desa Kedunggede dilaksanakan pengabdian berupa pelatihan penggunaan aplikasi mobile pengaduan masyarakat dengan tujuan agar aplikasi dapat memudahkan masyarakat dalam melaporkan berbagai aduan seperti infrastruktur desa, kekaduahan, alam, dan sebagainya kepada pemerintah desa. Fitur – fitur pada aplikasi pengaduan yaitu fitur unggah bukti berupa foto untuk memvalidasi aduan-aduan sehingga aduan-aduan masyarakat secara efektif dan efisien dapat diketahui oleh pemerintah desa. Aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aduan secara langsung, efektif dan

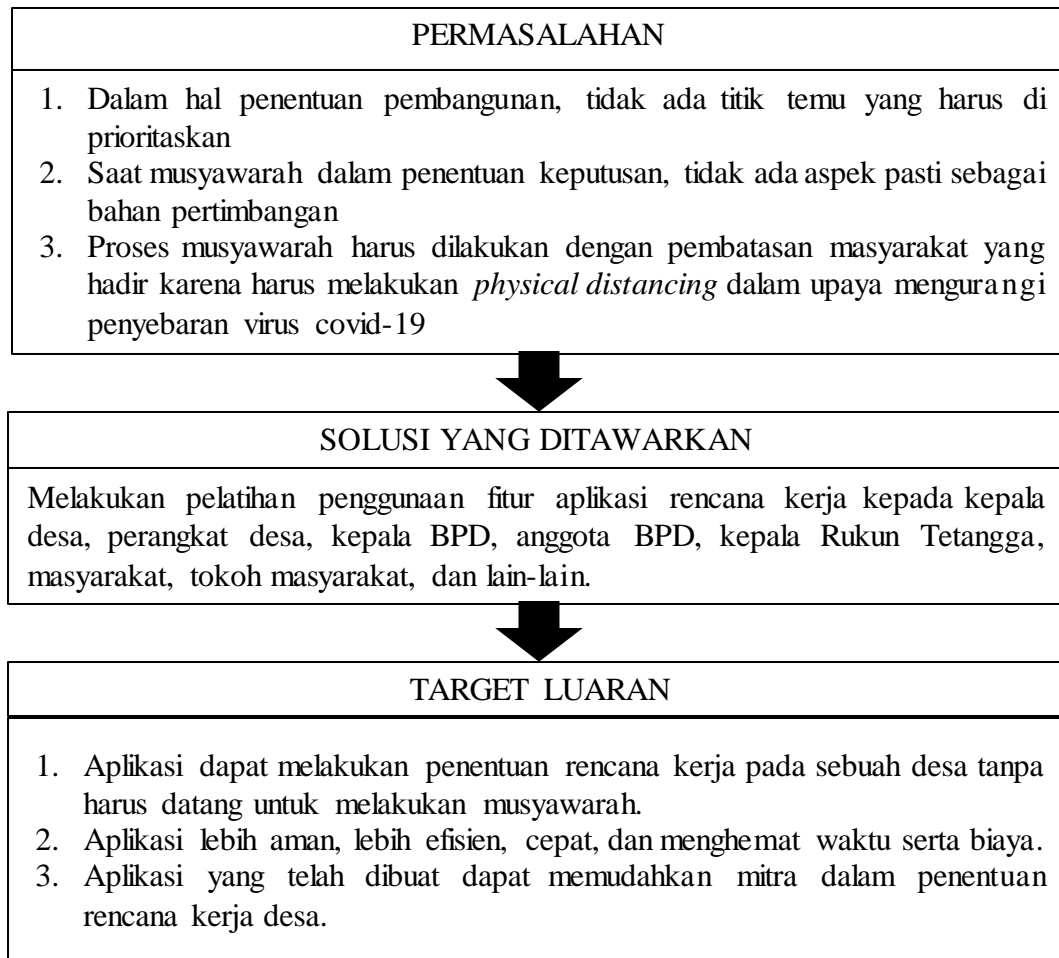
efisien (Setyaningsih, 2021). Pada tahun 2021, kami melakukan penelitian dengan menghasilkan suatu aplikasi berupa aplikasi e-Surat yang dirancang untuk mempermudah masyarakat Desa Kedunggede dalam mengajukan surat pengantar seperti pembuatan KTP, pembuatan KK, pembuatan SKCK, penghasilan orang tua dan sebagainya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa Kedunggede (Setyaningsih, 2022). Pada tahun 2021, kami melaksanakan kembali pengabdian di pemerintahan desa Kedunggede berupa pelatihan implementasi aplikasi E-Surat berbasis Mobile. Aplikasi dibuat untuk memberikan kemudahan dalam melakukan pengajuan surat oleh masyarakat desa Kedunggede. Aplikasi ini digunakan untuk pengajuan surat - surat yaitu surat pengantar, surat kelahiran, surat keterangan, surat serbaguna, dan lain - lain. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan pengajuan surat dengan aplikasi ini, tidak perlu datang dan mengantre, sehingga akan aman, efektif, efisien, hemat waktu dan biaya (Setyaningsih, 2021).

### **TARGET LUARAN YANG DICAPAI**

Keberhasilan kegiatan pelatihan aplikasi penentuan prioritas rencana kerja Pemerintahan Desa, yaitu sebagai berikut :

- a. Mitra mengetahui cara menggunakan aplikasi penentuan prioritas rencana kerja dengan baik dan benar
- b. Mitra dapat mengoperasikan aplikasi penentuan prioritas rencana kerja untuk mempermudah dalam penentuan rencana kerja desa
- c. Aplikasi penentuan prioritas rencana kerja membuat mitra lebih aman, lebih efisien, cepat, dan menghemat waktu serta biaya dalam pengajuan penentuan prioritas rencana kerja

Berdasarkan uraian tersebut diperoleh gambaran berupa skema permasalahan, potensi, pemecahan masalah, dan target luaran kegiatan pengabdian pada gambar 3.



Gambar 3. Skema pengabdian masyarakat

## **METODE PELAKSANAAN**

Tim AMM yang terdiri dari ketua (dosen) dan anggota pelaksana (mahasiswa) melakukan persiapan penyelenggaraan kegiatan. Ketua memiliki tugas untuk mengumpulkan data melalui pengamatan atau observasi terhadap proses kegiatan musyawarah RT, musyawarah RW, dan musyawarah desa yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja. Setelah menemukan permasalahan, tim akan menganalisis kebutuhan mitra. Ketua tim bertanggung jawab dalam penyusunan proposal dan penyusunan laporan akhir kegiatan Amikom Mitra Masyarakat. Sementara itu, anggota pertama memiliki tugas untuk menyiapkan dan memastikan bahwa aplikasi rencana kerja dapat digunakan dengan lancar. Anggota

kedua bertugas untuk menyiapkan kebutuhan – kebutuhan kegiatan pelatihan aplikasi rencana kerja, seperti daftar materi pelatihan, daftar hadir peserta, proyektor, koneksi internet, meja, kursi, dan telepon genggam. Tim AMM kemudian berkoordinasi dengan perangkat desa untuk fasilitas – fasilitas dan penentuan tamu undangan (kepala desa, kepala BPD, RT/RW, dan tokoh masyarakat desa). Mitra dan karang taruna melakukan koordinasi terkait dokumentasi pelatihan pelaksanaan rencana kerja. Pelatihan implementasi rencana kerja ini dimulai dengan sambutan dari ketua tim Amikom Mitra Masyarakat dan kepala desa. Selanjutnya, penyampaian materi tentang infrastruktur desa Kedunggede meliputi dukungan untuk mengakses jaringan seluler 4G, jaringan internet fiber optik dan lain-lain. Pada acara inti, ketua tim dibantu anggota melakukan presentasi fitur - fitur aplikasi kepada peserta pelatihan. Peserta pelatihan adalah kepala desa dan perangkat desa, ketua dan anggota BPD, tokoh masyarakat dan perwakilan warga tiap desa. Acara selanjutnya setelah acara inti selesai yaitu sesi tanya jawab dari peserta. Setelah itu, jika sudah selesai sesi tanya jawab, maka pelatihan implementasi rencana kerja ditutup. Tim melakukan evaluasi kegiatan bersama mitra. Ketua tim akan melaporkan kegiatan AMM dan membuat artikel pengabdian masyarakat. Anggota bertanggung jawab untuk mengunggah video dokumentasi ke YouTube dan mengirim artikel tentang kegiatan yang dilakukan kepada penerbit koran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan AMM terlaksana sesuai agenda kegiatan. Observasi telah dilakukan oleh tim AMM untuk mengetahui alur dan prosedur dalam menyusun program kerja dan anggaran di wilayah desa. Desa memprioritaskan dana desa yang ada menjadi tiga alokasi yaitu pembangunan sarana dan prasarana desa, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Tim AMM melakukan observasi dan memperoleh data bahwa setidaknya ada 2 sampai 4 masukan saja yang dapat disetujui oleh pemerintah desa. Seharusnya, dalam memberikan persetujuan, perlu adanya pertimbangan yang jelas pada setiap masukan dari ketua RW. Kegiatan Musyawarah berlangsung untuk menerima

masukan-masukan dari masyarakat. Selanjutnya, masukan-masukan tersebut dimusyawarahkan saat rapat Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa. Hasil rapat Musyawarah tersebut menghasilkan beberapa keputusan, namun seringkali keputusan-keputusan tersebut tidak dapat diterima sepenuhnya. Hal tersebut yang menjadi kendala pada setiap tahunnya dalam penyusunan kegiatan program kerja dan anggaran karena keputusan tersebut tidak melihat kebutuhan masyarakat. Kendala lainnya adalah tidak semua masyarakat datang ke rapat untuk memberikan masukan, sehingga tidak banyak masukan yang diterima untuk ditindak lanjuti. Alternatif lain didapatkan dengan cara ketua RT menampung masukan dari masyarakat.

Dengan permasalahan – permasalahan yang ada, tim AMM kami menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan penerapan Aplikasi Penentuan Prioritas Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang telah dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan desa. Ada beberapa hak akses pada aplikasi tersebut yaitu super admin, admin, admin RT, admin RW, dan user.



Gambar 1. Rapat Persiapan Pelatihan

Demi kelancaran kegiatan pelatihan maka, tim AMM dari Universitas Amikom Purwokerto yang diketuai oleh Gustin Setyaningsih, S.Kom., M.MSI beserta mahasiswa melakukan kerjasama dengan mitra yaitu pemerintah desa. Sebelum terlaksananya kegiatan, kami melakukan pertemuan untuk membahas persiapan-persiapan kegiatan pelatihan dengan perwakilan pemerintahan desa.



Gambar 2. Peserta Pelatihan

Kegiatan Pelatihan Aplikasi Penentuan Prioritas Rencana Kerja Pemerintahan Desa telah dilaksanakan pada hari Senin, 3 Oktober 2022 di Gedung Serbaguna Desa Kedunggede yang dihadiri oleh 50 peserta. Peserta pelatihan yaitu Bapak Sutomo selaku Kepala Desa Kedunggede, perangkat desa, ketua dan anggota BPD, ketua RT/RW, ibu-ibu PKK, Karang Taruna, Linmas, dan Tokoh Masyarakat.



Gambar 3. Peserta Pelatihan

Ketua tim Gustin Setyaningsih, S.Kom., M.MSI. membuka kegiatan pelatihan, kemudian dilanjutkan sambutan oleh Bapak Sutomo selaku Kepala Desa. Selanjutnya, dimulailah inti acara pelatihan. Tim AMM menginformasikan kepada para peserta bahwa pada aplikasi juga ada beberapa fitur lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat yaitu monitoring laporan aduan masyarakat dan E-Surat. Selanjutnya Tim AMM menginstruksikan peserta untuk membuka modul yang sudah dibagikan untuk panduan penggunaan aplikasi. Para peserta mengikuti

pelatihan dengan memasukkan data masukan program kerja mengetahui prioritas utama RKPDes yang akan direkapitulasi pada aplikasi.

Pada aplikasi, terdapat tiga hak akses, yaitu super admin untuk perangkat desa bagian kepala urusan pembangunan desa, admin untuk ketua RT/RW, dan user untuk masyarakat desa. Berikut adalah alur menggunakan aplikasi tersebut super admin memasukan beberapa data berupa masukan dari masyarakat berupa masukan yang sering diusulkan tahun sebelumnya dan perkiraan masukan untuk tahun ini atau selanjutnya, kemudian juga memasukan data indikator dan nilai setiap indikator pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dapat dipilih user yaitu masyarakat. Jika User akan memberikan masukan mengenai rencana kerja anggaran desa, maka user memilih jenis masukan untuk selanjutnya menunggu disetujui oleh ketua RT. User hanya dapat memilih 1 program kerja. Jika sudah melakukan persetujuan, maka tidak dapat memilih program kerja lagi. Jika user tidak melakukan persetujuan program kerja, maka dapat memilih lagi program kerja lainnya atau bahkan bisa tidak memilih semua program kerja. Fitur untuk melakukan persetujuan program kerja berupa fitur votting. Jika setuju, maka akan muncul tanda centang hijau. Jika tidak setuju, maka akan muncul tanda silang merah. Pada admin RT dan RW, terdapat menu informasi mengenai masukan dari masyarakat. Prioritas masukan yang akan disetujui akan dilanjutkan ke rapat musyawarah dusun menggunakan fitur tombol persetujuan dan penolakan masukan. Masukan yang disetujui ataupun ditolak disesuaikan dengan kebutuhan dana desa.

Tujuan dari kegiatan AMM dengan melakukan kegiatan Pelatihan Aplikasi Penentuan Prioritas Rencana Kerja Pemerintahan Desa adalah memberikan kemudahan kepada pemerintah desa dan masyarakat Desa Kedunggede dalam melakukan penentuan prioritas rencana kerja pemerintahan desa. Kerjasama dengan pemerintah desa tidak berakhir karena sudah terlaksananya pelatihan. Tim AMM dan pemerintah desa masih melanjutkan kerjasama untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan aplikasi ini untuk mengevaluasi keseluruhan rangkaian kegiatan pelatihan dan AMM. Kepala Desa dan salah satu peserta mengucapkan terima kasih kepada kami atas dibuatkannya aplikasi untuk

Desa Kedunggede dan diadakannya pelatihan penggunaan aplikasi yang sangat bermanfaat bagi Pemerintah desa dan masyarakat Desa Kedunggede. Harapan pemerintah desa kepada tim AMM adalah untuk terus melakukan pendampingan penggunaan aplikasi kepada pemerintah desa dan masyarakat.

Selama pelaksanaan pelatihan ada beberapa kendala yang terjadi yaitu pada saat memberikan penjelasan dan arahan harus berulang-ulang kepada peserta karena para peserta baru menggunakan aplikasi sehingga masih merasa bingung. Namun hal tersebut bukan merupakan kendala yang besar karena aplikasi ini digunakan dan diterapkan oleh peserta untuk pertama kalinya jadi kami maklumi. Semua rangkaian kegiatan pelatihan dapat berjalan dengan lancar karena bisa mengkondisikan dan mengendalikan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pelatihan Aplikasi Penentuan Prioritas Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kegiatan dari Amikom Mitra Masyarakat yang diadakan oleh Gustin Setyaningsih, S.Kom., M.MSI. sebagai dosen di Universitas Amikom Purwokerto dan tim yang bekerja sama dengan pemerintah Desa Kedunggede. Terlaksananya kegiatan dengan lancar memiliki tujuan yaitu memberikan kemudahan kepada pemerintahan desa dan masyarakat Desa Kedunggede dalam melakukan Penentuan Prioritas Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Kesimpulan kegiatan pelatihan ini adalah telah terlaksananya pelatihan dengan lancar. Pemerintah desa dan masyarakat telah dilatih untuk menggunakan aplikasi Penentuan Prioritas Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang akan memberikan kemudahan dalam Penentuan Prioritas Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Saran untuk kegiatan pelatihan ini adalah akan ada keberlanjutan pelatihan karena untuk membiasakan menggunakan aplikasi tidak hanya bisa satu kali pelatihan saja. Tetap terjalin kerjasama antara tim AMM dengan pemerintah desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan AMM kami. Terutama teruntuk Universitas Amikom Purwokerto yang telah memberikan dukungan dalam bentuk finansial, waktu, motivasi, dan pengetahuan kepada tim kami sehingga Pengabdian Kepada Masyarakat Amikom Mitra Masyarakat (AMM) dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, R., Wulandari, W., & Hafifah, N. (2018). Pengembangan Aplikasi Web Mobile Penjadwalan Tugas Aparatur Desa Untuk Meningkatkan Layanan Masyarakat. *JTKSI (Jurnal Teknologi Komputer dan Sistem Informasi)*, 1(3), 81-86.
- Cholik, C. A. (2021). Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi/ICT dalam Berbagai Bidang. *Jurnal Fakultas Teknik Kuningan*, 2 (2), 39-46.
- Hariguna, T., & Okviantari, A. (2018). Penentuan Prioritas Program Kerja Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process.
- Purbasari, H., Dewi, F. R., & Habibah, U. (2018). Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa pada Desa Tangkisan, Kecamatan Tawang Sari Kab. Sukoharjo. The National Conference on Management and Business (NCMAB) 2018.
- Septima, R., & Zulfa, I. (2020). Pelatihan Ilmu Teknologi Komputer Dalam Meningkatkan Kemampuan Administrasi Perangkat Desa Tan Saril. *JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)*, 1(1), 1-7.
- Setyaningsih, D. (2019). *Sistem Pendukung Keputusan Menentukan prioritas rkpdes (Rencana Kerjapembangunan Desa) Menggunakan metode Simple Additive Weighting (Saw) Studi Kasus: Desa Rambah Baru* (Doctoral Dissertation, Universitas Pasir Pengaraian).
- Setyaningsih, Gustin., Bachtiar, Rizky Bangkit., Anuggilarso, Luky Rafi., Ma'arifah, windiya. (2021). Pelatihan Implementasi Aplikasi E-Surat Berbasis Mobile. *JPMB : Jurnal Pemberdayaan masyarakat berkarakter*, 4, No 2.
- Setyaningsih, Gustin., Prasetyo, Muhamad Awiet Wiedanto., Fitria, Heraya., Karomatunnisa, Hanun., Dan., Pandanarum, P. (2021). Pelatihan Pengaduan Aplikasi Mobile Pengaduan Masyarakat Kepada Pemerintah Desa Kedunggede. *Pengabdian Mitra Masyarakat*, 3, No. 1.

- Setyaningsih, Gustin., Prasetyo, Muhamad Awiet Wiedanto., Anuggilarso, Luky Rafi., Pandanarum, P., Bachtiar, Rizky Bangkit., Karomatunnisa, Hanun. (2022). Perancangan Aplikasi E-Surat Berbasis Mobile Pada Pemerintahan Desa kedunggede kecamatan Lumbir. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, Vol. 9, No. 2, Juni 2022, Hal. 1430-1448.
- Tiza, A. L., & Taus, W. (2019). Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Di Desa Lemun Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara. *Sabdamas*, 1 (1), 271-277.